

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijabarkan secara komprehensif pada Bab IV, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana politisasi data dilakukan oleh akun Instagram @bakom.ri dalam membentuk citra politik Prabowo Subianto pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode campuran sekuensial eksplanatori (*sequential explanatory mixed method*) yang menggabungkan analisis kuantitatif melalui *scraping data* dan *topic modelling* dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis wacana kritis. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh rangkaian temuan penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Akun Instagram @bakom.ri sebagai kanal komunikasi resmi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) secara sistematis melakukan politisasi data dalam periode September–Desember 2025. Dari 366 unggahan yang dipublikasikan selama periode tersebut, sebanyak 31,6% atau sekitar 116 unggahan secara eksplisit menampilkan data statistik berupa infografis, angka capaian program, dan visualisasi kuantitatif yang dikemas secara konsisten dengan skema warna kuning-emas, yang dalam semiotika dimaknai sebagai simbol kemewahan, kejayaan, dan kemakmuran. Pola penyajian ini menunjukkan bahwa data tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi publik, melainkan diarahkan secara strategis untuk membangun persepsi positif terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto di ruang digital pemerintahan
- b. Politisasi data yang dilakukan oleh @bakom.ri diwujudkan melalui tiga bentuk praktik *cherry picking* yang bekerja secara sinergis. Pertama, pemilihan indikator yang menguntungkan, yaitu dengan secara eksklusif menonjolkan data capaian positif seperti pertumbuhan ekonomi 5,12%, penurunan angka kemiskinan dari 8,57% menjadi 8,47%, pembentukan 80.400 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penyaluran bantuan

sosial kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat, sementara data dari lembaga survei independen yang menunjukkan realitas berlawanan seperti Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja BI yang merosot ke titik terendah sejak pandemi, penilaian kinerja CELIOS sebesar 3/10, dan penurunan skor *Corruption Perceptions Index* Indonesia menjadi 34/100 sama sekali tidak pernah dimunculkan. Kedua, penyederhanaan dan dekontekstualisasi data, yaitu menyajikan angka-angka capaian tunggal tanpa disertai basis perbandingan, metodologi pengukuran, atau informasi keterbatasan data yang memungkinkan publik melakukan verifikasi secara mandiri. Ketiga, personalisasi capaian kolektif, yaitu dengan secara konsisten mengaitkan seluruh keberhasilan program lintas kementerian dengan sosok pribadi Presiden Prabowo Subianto melalui frasa seperti “Prabowo memastikan”, “di bawah kepemimpinan Prabowo”, dan “Prabowo mewujudkan” yang muncul pada lebih dari 67% caption akun tersebut.

- c. Hasil analisis kuantitatif melalui *topic modelling* dan *word cloud* terhadap 116 unggahan berbasis data statistik mengidentifikasi empat titik nodal (*nodal points*) yang menjadi pusat pembentukan makna dalam wacana akun @bakom.ri. Titik nodal pertama adalah kelompok kata personalisasi figur kepemimpinan yaitu “presiden” (85), “prabowo” (63), dan “subianto” (43) yang mengakumulasi 191 kemunculan atau 16,6% dari total frekuensi 25 kata teratas. Titik nodal kedua adalah kata “pemerintah” dan “program” yang berfungsi sebagai kerangka legitimasi kelembagaan. Titik nodal ketiga adalah kata “rakyat” (61) dan “masyarakat” (65) yang membentuk subjek kolektif populus. Titik nodal keempat adalah penanda kosong (*empty signifiers*) berupa kata “kuat”, “nyata”, “cepat”, dan “hadir” yang bersifat multitafsir dan mampu menampung berbagai jenis capaian dari sektor yang berbeda ke dalam satu kesan efektivitas kepemimpinan yang seragam. Keempat titik nodal ini bekerja saling melengkapi membentuk struktur wacana yang koheren dan menutup ruang bagi interpretasi alternatif.
- d. Berdasarkan analisis wacana kritis Laclau dan Mouffe (1985), ditemukan bahwa akun @bakom.ri secara aktif mempersempit medan kewacanaan (*field of discursivity*) yang tersedia di ruang publik. Mekanisme ini

dilakukan melalui dua cara yang saling memperkuat: pertama, secara formal melalui pemberian label DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) terhadap narasi media yang dianggap bertentangan dengan informasi resmi pemerintah, termasuk dalam satu kasus terhadap pemberitaan media konvensional terkemuka; dan kedua, secara informal melalui tekanan buzzer terhadap wacana kritis yang disampaikan oleh lembaga akademik dan masyarakat sipil. Kondisi ini menciptakan pengakhiran (*closure*) wacana yang bersifat sementara dan politis, di mana data disajikan sebagai fakta final yang tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut, meskipun berbagai lembaga survei independen terus menghasilkan temuan yang menantang validitas narasi tersebut.

- e. Dalam tinjauan teoritis menggunakan kerangka populisme Ernesto Laclau (2005), ditemukan bahwa politisasi data pada akun @bakom.ri bekerja melalui empat unsur logika populis yang saling berkaitan. Pertama, tuntutan sosial (*social demands*) diartikulasikan melalui penyajian data capaian yang dikemas seolah-olah merespons langsung kebutuhan mendesak masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan, meskipun kondisi riil yang dirasakan masyarakat menunjukkan realitas yang berbeda. Kedua, batas antagonistik (*frontier*) dikonstruksikan secara implisit antara “Prabowo dan rakyat” di satu sisi, dan “pihak yang menghalangi” di sisi lain, tanpa harus menyebut nama kelompok secara eksplisit. Ketiga, penanda kosong (*empty signifiers*) seperti kata “nyata”, “kuat”, “hadir”, dan “rakyat” digunakan untuk menyederhanakan berbagai capaian yang heterogen ke dalam satu narasi keberhasilan yang seragam. Keempat, proses hegemonik terjadi melalui penamaan (*naming*) yang berulang di mana sosok Prabowo Subianto diposisikan sebagai titik singular yang menanggung representasi dari seluruh tuntutan sosial yang sebenarnya heterogen, menciptakan investasi afektif yang menghubungkan keberhasilan kolektif institusional dengan figur pemimpin secara personal.
- f. Politisasi data yang dilakukan oleh @bakom.ri menghasilkan kesenjangan (*gap*) yang nyata antara narasi keberhasilan yang dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat dan

terekam dalam berbagai instrumen survei independen. Di satu sisi, akun @bakom.ri mengklaim tingkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 80%, namun di sisi lain survei CELIOS mencatat penilaian kinerja presiden hanya berada di angka 3 dari skala 10, dengan 72% responden menilai kinerja pemerintah buruk atau sangat buruk. Kesenjangan yang tajam ini merupakan indikasi paling konkret dari bekerjanya politisasi data sebagai instrumen legitimasi simbolik, di mana angka dan statistik digunakan bukan semata untuk kepentingan transparansi publik, melainkan untuk membangun dan mempertahankan citra kepemimpinan di tengah tekanan legitimasi yang sesungguhnya dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto.

- g. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran paradigma dalam komunikasi pemerintahan Indonesia yang mencerminkan personalisasi politik (*political personalization*) yang lebih intens dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Berbeda dengan era pemerintahan SBY yang menjaga komunikasi kebijakan melalui juru bicara yang melekat pada Sekretariat Kabinet, maupun era Jokowi yang lebih berorientasi pada pendekatan institusional, Bakom RI pada era Prabowo secara sistematis menggunakan media sosial untuk mempersonifikasikan capaian institusional ke dalam sosok presiden secara personal. Padahal, Perpres Nomor 96 Tahun 2025 dalam Pasal 3 menetapkan tugas Bakom RI sebagai orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan pemerintah, bukan sebagai lembaga manajemen citra personal presiden. Pergeseran ini menunjukkan adanya ketegangan antara mandat kelembagaan yang bersifat institusional dengan praktik komunikasi yang lebih menyerupai kampanye politik personal dalam konteks pemerintahan aktif.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti mengajukan sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut

1. Bagi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).
Bakom RI perlu meninjau ulang strategi komunikasi datanya agar tidak

terjebak dalam praktik cherry picking yang menggerus kepercayaan publik dalam jangka panjang. Penyajian data capaian pemerintah seharusnya disertai dengan konteks yang memadai, termasuk penjelasan metodologi pengukuran, basis perbandingan, dan keterbatasan data, sehingga publik dapat melakukan verifikasi secara mandiri. Selain itu, Bakom RI perlu menghentikan praktik pelabelan DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) terhadap pemberitaan media massa yang merupakan kewenangan Dewan Pers, karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar mekanisme regulasi pers yang telah mapan, tetapi juga mengancam ruang kebebasan pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Komunikasi pemerintah yang baik seharusnya membangun dialog dua arah dengan publik, bukan melanggengkan komunikasi satu arah yang meminggirkan pandangan berbeda.

2. Bagi Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga komunikasi resmi negara beroperasi sesuai dengan mandat kelembagaannya, yaitu mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah secara institusional, bukan sebagai alat manajemen citra personal presiden. Perpres Nomor 96 Tahun 2025 yang menetapkan tugas Bakom RI sebagai “orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan pemerintah” seharusnya dijalankan dengan menjaga garis yang jelas antara kepentingan komunikasi negara dengan kepentingan politik personal. Pemerintah juga perlu memperkuat independensi lembaga statistik nasional dan memastikan data publik dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, akademisi, dan media, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Bagi Masyarakat dan Pemilih. Masyarakat perlu mengembangkan literasi data (*data literacy*) dan kemampuan berpikir kritis dalam membaca narasi di balik informasi yang disajikan pemerintah, khususnya di media sosial. Ketika mengonsumsi konten berbasis data dari kanal-kanal resmi pemerintah, masyarakat perlu membiasakan diri untuk mencari informasi pembandingan dari sumber independen seperti lembaga survei, akademisi, dan media massa yang dapat dipercaya. Kepercayaan yang kritis terhadap data

pemerintah bukan berarti apriori menolak seluruh informasi yang disajikan, melainkan memiliki kemampuan untuk mempertanyakan konteks, metodologi, dan selektivitas penyajian data yang disampaikan oleh kanal komunikasi resmi negara.

4. Bagi Media Massa dan Jurnalis. Media massa dan jurnalis perlu mempertahankan independensi dan profesionalisme dalam melakukan verifikasi terhadap data dan klaim yang dipublikasikan oleh kanal komunikasi resmi pemerintah. Jurnalisme data (*data journalism*) yang menghadirkan konteks dan analisis kritis terhadap statistik pemerintah menjadi sangat penting sebagai penyeimbang dominasi narasi tunggal dari komunikasi resmi negara. Tekanan dalam bentuk apa pun yang berupaya mereduksi ruang kritis jurnalis, termasuk melalui pelabelan yang tidak melalui mekanisme resmi Dewan Pers, seharusnya disikapi dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah ditetapkan.
5. Bagi Peneliti dan Akademis. Penelitian tentang politisasi data dalam komunikasi resmi pemerintahan masih sangat terbatas di Indonesia, sehingga sangat diperlukan kajian-kajian lanjutan yang lebih mendalam dan lintas disiplin. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan analisis tidak hanya pada platform Instagram, tetapi juga pada platform media sosial lain seperti TikTok, YouTube, dan X (Twitter) yang turut digunakan sebagai kanal komunikasi resmi pemerintah. Selain itu, penelitian komparatif yang membandingkan pola politisasi data lintas pemerintahan atau lintas negara akan memberikan kontribusi teoretis yang lebih kaya bagi pengembangan kajian komunikasi politik digital, populisme digital, dan tata kelola data publik di era demokrasi kontemporer. Kajian dari perspektif hukum, sosiologi, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan juga sangat diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena ini.